

**BATASAN WILAYAH KEWENANGAN KERJA NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA SURAT KETERANGAN HAK WARIS**

(Analisis Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 29

P/HUM/2022)

THESIS



ZEFANYA ELIAN BENYAMIN

NIM : 12224034

PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2025

TESIS

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 05 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Erma Zahro Noor, S.H.,M.H



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

TESIS

PADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Anggota : Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.

: Dr. TAHEGGA PRIMANANDA A S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar S2 Kenotariatan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 Februari 2026.
Yang membuat pernyataan,



ZEFANYA EIAN BENYAMIN

NIM : 12224034

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“BATASAN WILAYAH KEWENANGAN KERJA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KETERANGAN HAK WARIS (Analisis Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022)”**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya atas bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya kepada:

1. Dr. Arasy Alimudisn, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Narotama
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
3. Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama
4. Dr. Erma Zahro Noor, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dan juga anggota penguji skripsi yang dengan begitu sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis menyusun skripsi, apa yang telah ibu berikan begitu berharga dan tidak bisa dibalas dengan apapun, hanya kata terima kasih yang dapat diucapkan. Semoga ibu selalu mendapat lindungan dan kesehatan dari Tuhan yang maha Esa.
5. Ayahanda tercinta Christian Benyamin dan Ibunda tercinta Esther Ratna Widhiastuti S.E,S.H,M.KN yang telah memberikan semangat moral dan materiil hingga dapat terselainya skripsi ini dengan baik.
6. Saudara kandung tercinta Kezia Alles Benyamin Noi atas semangat dan doanya.
7. Teman seperjuangan penulis Kak Rosi,Kak Nendy,Kak Bintang,Kak Putri,Kak Fernando selama menempuh kuliah yang saling memberikan motivasi untuk mendapatkan gelar bersama.
8. Untuk Sahabat Pena Online sekaligus Idola yang saya Banggakan dan sayangi yang sudah Memberi dukukungan penuh saya dari jauh Marsha Lenathea Lopian.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini, masih terdapat kekurangan- kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam melaksanakan tugas penelitian tesis ini, untuk itu penulis mohon maaf dan demi penyempurnaan

Tesis ini, penulis berharap dengan segala hormat, saran dan pendapat dari Tim Penguji.



Surabaya, 05 Februari 2026.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zefanya', is written over the lower right portion of the UNESA logo.

ZEFANYA ELIAN BENYAMIN

NIM: 12224034

ABSTRAK

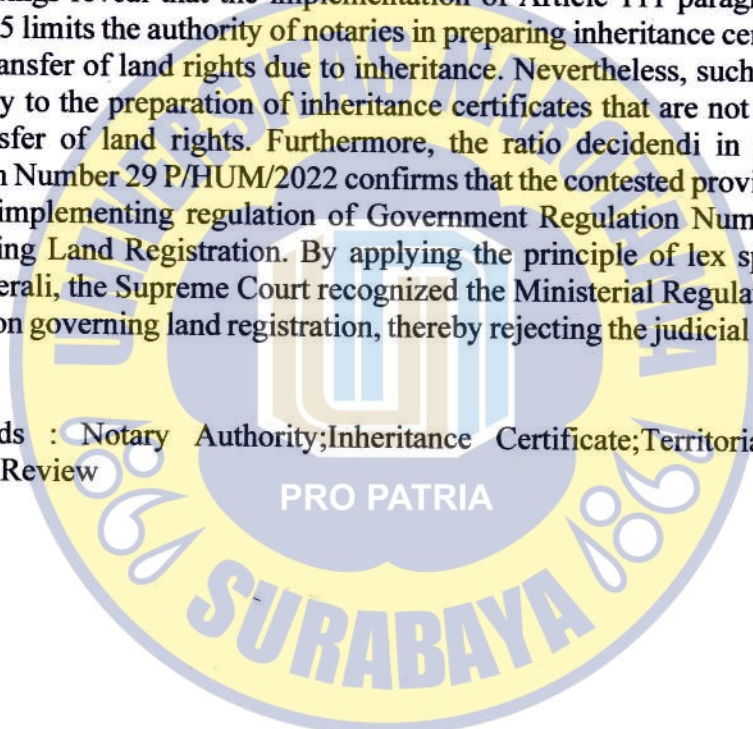
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat adanya Disharmonasi peraturan batasan wilayah kewenangan kerja notaris dalam pembuatan akta surat keterangan hak waris. Masalah dalam penelitian ini adalah Menganalisis tentang Bagaimana kewenangan wilayah kerja Notaris dalam pembuatan Surat keterangan hak waris dengan di terapkan nya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah serta Menganalisis Ratio Decidendi dari Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022. Jenis penelitian ini bersifat hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah yaitu dalam pembuatan akta surat keterangan hak waris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan membuat kewenangan Notaris menjadi terbatas, namun untuk pembuatan akta keterangan hak mewaris yang tidak berkaitan dengan peralihan hak atas tanah maka kewenangan Notaris tidak menjadi terbatas. Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara dalam Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022 adalah menegaskan bahwa bahwa Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana yang sah dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali*, dengan menempatkan Permen ATR/BPN sebagai aturan khusus dalam bidang pendaftaran tanah yang dapat mengatur persyaratan administratif secara lebih rinci, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Akta Surat Keterangan Hak Waris, Uji Materiil

ABSTRACT

This thesis examines the existence of regulatory disharmony concerning the territorial scope of a notary's authority in the preparation of inheritance certificates. The research focuses on two main issues: first, the territorial authority of notaries in preparing inheritance certificates following the implementation of Article 111 paragraph (1) letter c number 5 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021 concerning Land Registration; and second, the ratio decidendi of the Supreme Court Decision on Judicial Review Number 29 P/HUM/2022. This study adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the implementation of Article 111 paragraph (1) letter c number 5 limits the authority of notaries in preparing inheritance certificates related to the transfer of land rights due to inheritance. Nevertheless, such limitation does not apply to the preparation of inheritance certificates that are not associated with the transfer of land rights. Furthermore, the ratio decidendi in Supreme Court Decision Number 29 P/HUM/2022 confirms that the contested provision constitutes a valid implementing regulation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. By applying the principle of *lex specialis derogat legi generali*, the Supreme Court recognized the Ministerial Regulation as a special regulation governing land registration, thereby rejecting the judicial review petition.

Keywords : Notary Authority; Inheritance Certificate; Territorial Jurisdiction; Judicial Review



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.5.1. Tinjauan Teori Hukum	8
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Disharmoni Peraturan.....	11
1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Notaris	11
1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewenangan.....	13
1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	13
1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Konsep Surat Keterangan Hak Waris.....	15
1.6. Orisinalitas Penelitian.....	17
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Tipe Penelitian.....	19
1.7.2. Pendekatan (<i>Approach</i>)	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Resouce</i>)	20
1.8. Sistematika Penelitian	22

BAB II KEWENANGAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA 5 PERMEN ATR/KBPN TAHUN 2021 DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS.....	24
2.1. Kewenangan Notaris	24
2.2. Surat Keterangan Hak Waris.....	30
2.2.1. Dasar Hukum Surat Keterangan Waris	31
2.3. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan.....	34
2.4. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta dan Surat Keterangan Waris	38
BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN HUM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29 P/HUM/2022	49
3.1. Teori Ratio Decidendi	49
3.2. Ratio Decidendi Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022	51
3.3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Batasan Wilayah Kerja Notaris	67
3.4. Rasionalitas Pembatasan Wilayah Kerja Notaris dalam Perspektif Efisiensi dan Ketertiban Hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	74
BAB IV PENUTUP.....	84
4.1. Kesimpulan.....	84
4.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86